

ASPEK MANAGERIAL KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA SAMARINDA

Izrulsyah Effendy¹

¹Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Alamat Korespondensi: alif.effendy@gmail.com

Abstract

This article will discuss managerial aspects in implementing flood control policies by the PUPR Office of Samarinda City as seen from four policy implementation variables, namely communication, resources, disposition, and communication. The research method used is qualitative. Data were collected through observation, interviews, and literature study—data analysis using interactive data analysis. The study results indicate that the managerial aspects of the four policy implementation variables in the implementation of flood control policies have been running quite well. In some cases, there are still obstacles.

Keyword: managerial aspect, policy, flood control

Abstrak

Artikel ini akan membahas mengenai aspek managerial dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir oleh Dinas PUPR Kota Samarinda yang dilihat dari empat variabel implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan komunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek managerial empat variabel implementasi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir sudah berjalan dengan cukup baik meskipun di beberapa hal masih terdapat hambatan.

Kata Kunci: aspek managerial, kebijakan, pengendalian banjir

Pendahuluan

Samarinda sebagai Ibu Kota Kalimantan Timur saat ini yang tengah berkembang akan tetapi ditengah perkembangan masih mempunyai beberapa masalah bencana salah satunya adalah banjir. Kejadian banjir yang saat ini tidak hanya terjadi pada saat musim hujan namun terjadi juga pada saat terjadi hujan hanya dengan durasi 3 jam sudah dapat mengakibatkan bencana banjir, dimana hal ini sangat mengganggu aktivitas warga Kota Samarinda.

Kota Samarinda dilihat dari geografi memiliki luas wilayah sebesar 718 kilometer persegi, diantaranya dengan luas 180.000 meter persegi yang merupakan daerah resapan air menjadikan Kota Samarinda berpotensi menimbulkan banjir atau rawan banjir (Sistem Informasi Geografis Kota Samarinda).

Dinas Pekerjaan Umum Kota Samarinda sudah melakukan berbagai upaya yang antara lain adalah pemeliharaan saluran drainase kota, melakukan pembenahan sungai-sungai yang melintas kota, pembangunan sarana pengendali banjir serta adanya beberapa aturan yang telah

dikeluarkan untuk mengendalikan banjir, akan tetapi berbagai upaya tersebut belum maksimal dalam mengatasi masalah banjir yang terjadi, maka perlu dilakukan penataan terpadu untuk pengendalian banjir dengan menyusun prioritas penanganan dan pembiayaan sesuai dengan kondisi actual serta prediksi pembangunan masa mendatang. Didapat hasil laporan dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Samarinda sampai tahun 2019 dimana terdapat 50 titik bencana banjir yang tersebar di 10 Kecamatan.

Pemerintah Kota Samarinda berupaya untuk menjalankan peran dalam menanggulangi permasalahan banjir yang terjadi di Kota Samarinda yang berpedoman pada Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 25 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pengendalian bencana, dimana peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah maka perlu dilakukan aspek kebijakan dan manajemen yang baik dalam mengatasi masalah banjir yang saat ini melanda Kota Samarinda.

Penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan banjir di Kota Samarinda hanya membahas pelaksanaan program kebencanaan dalam penanggulangan bencana banjir kemudian (Rafiq, 2014), upaya –upaya yang dilakukan pemerintah serta kendala yang dihadapi (Sodiq, 2015) dan Program Pengendalian Banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kelurahan Air Putih (Susanti, 2018). Tulisan ini meskipun berada pada tema yang sama terkait banjir di Kota Samarinda namun akan membahas dari sisi aspek managerial kebijakan yang pada penelitian sebelumnya belum dibahas sehingga hal ini menjadi satu gap penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

Kerangka Teori *Kebijakan Publik*

Kebijakan publik mencakup berbagai bidang dan sektor seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan Gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Kebijakan dapat diartikan sebagai hipotesis kondisi sebab akibat yang bisa diramalkan dan harus dapat dibedakan antara yang publik dan swasta (Pressman dan Widavsky dalam Winarno, 2012). Kebijakan publik dapat diartikan sebagai hubungan antara pemerintah dan lingkungan (Agustino, 2014) namun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang bisa dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak (Islamy,

2014). Menurut Nugroho, terdapat dua karakteristik kebijakan publik yaitu mudah dipahami dan sesuatu yang mudah diukur (Nugroho, 2014)

Kebijakan publik memiliki tahapan sebagaimana yang diungkapkan oleh Dunn (2003) yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Edwards III menyatakan ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980).

Aspek managerial dalam penelitian akan melihat bagaimana Dinas PUPR Kota Samarinda dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian banjir dari sisi aspek managerial yang dipengaruhi oleh 4 variabel implementasi kebijakan Edwards III.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (Creswell, 2017; Neuman, 2017) guna mendapatkan gambaran aspek managerial Dinas PUPR Kota Samarinda dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua yaitu primer (*key informant*) dan sekunder (informan serta dokumen-dokumen data pendukung) (Moleong, 2006; Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara serta studi pustaka (Creswell, 2018). Analisis data yang sudah dikumpulkan akan dilakukan dengan model analisis data interaktif (Miles, Huberman and Saldana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Managerial Program Pengendalian Banjir di Kota Samarinda

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan pengawasan program pengendalian banjir di Kota Samarinda sangat penting, karena isu kebencanaan ini membutuhkan komunikasi yang cepat dalam menanggulangnya. Untuk itu perlunya managerial yang kompeten dalam pelayanan terhadap masyarakat untuk penanganan masalah banjir di Kota Samarinda, hal ini perlu dibentuk tim khusus yaitu tim reaksi cepat, dimana tim ini dapat memberikan informasi cepat mengenai prakiraan banjir reaksi cepat dan bantuan penanganan darurat banjir.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam penanganan banjir dilakukan terhadap instansi terkait maupun masyarakat. Adapun koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dilakukan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Dinas Damkar Kota Samarinda, BWS IV (Balai Wilayah Sungai) Provinsi Kaltim, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan. Selain itu penanganan banjir di Kota Samarinda dilakukan pula kepada masyarakat. Komunikasi dilakukan dengan mengadakan berbagai pertemuan, melakukan rapat koordinasi dalam penanganan banjir. Selain komunikasi secara langsung, Dinas PUPR Kota

Samarinda menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Dan dalam tahap ini pula komunikasi dapat dilakukan dengan sistem komando, akan tetapi koordinasi yang dilakukan lebih luas, yakni dengan melibatkan pemerintah maupun beberapa instansi lain. Dalam pembuatan Pos Komando harus ada langkah-langkah yang dilalui, baik itu berkoordinasi dan minta rekomendasi dengan BMKG yang merupakan lembaga profesional untuk menentukan status kebencanaan maupun koordinasi dengan pihak pimpinan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Gubernur Kaltim yang mempunyai hak untuk membuat kebijakan dan penerbitan surat keputusan tentang status darurat bencana banjir.

Hasil temuan penelitian dari sisi sumberdaya memperlihatkan bahwa pemerintah Kota Samarinda juga berharap peran aktif dari masyarakat dalam pencegahan, penanganan maupun pemulihan masalah banjir, akan tetapi masyarakat yang dilibatkan dalam setiap kegiatan penanggulangan sangat sedikit, bahkan hanya terbatas pada masyarakat yang tergabung dalam perlindungan masyarakat (Linmas) yang membantu masyarakat pada saat terjadi bencana. Bahkan walaupun telah dibentuk perlindungan masyarakat desa akan tetapi dinilai masih kurang berperan aktif dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Adapun yang memiliki kewenangan dalam program pengendalian banjir di berbagai kelurahan Kota Samarinda adalah Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda di Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (BPJSA). Temuan lainnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda telah berupaya melakukan penanganan tanggap darurat terhadap bencana. Penanganan tanggap darurat banjir dilakukan dengan upaya struktural dan non struktural. Penanganan struktural antara lain kegiatan bentuk fisik seperti menjaga jalan agar tetap fungsional, memperbaiki jalan, normalisasi sungai dan membangun waduk. Sedangkan penanganan non struktural antara lain peran serta masyarakat dalam menjaga antar instansi. Sarana dan prasarana yang ada dalam penanganan banjir di Kota Samarinda sudah cukup memadai, Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Samarinda sudah berupaya dalam melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana, dalam hal ini merupakan konsep pengendalian banjir yang dilakukan Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Samarinda, diantaranya adalah memperbaiki kondisi DAS yang rusak, reduksi banjir, normalisasi saluran/sungai, dan memperlancar aliran drainase.

Hasil temuan penelitian dari sisi disposisi, Dinas PUPR Kota Samarinda sudah melakukan semaksimal mungkin dan terus berupaya untuk mengatasi banjir di kelurahan sidodadi Samarinda Ulu dan Dinas PUPR Kota Samarinda berencana kedepannya akan melakukan pendalaman lagi di polder vorvo dan Gg. Indra sebagai resapan air di Kelurahan Sidodadi yang sekarang kedalamnya hanya 2 meter rencana kedepannya akan melakukan pendalaman sekitar 10 atau 15 meter ini yang kami akan lakukan nanti sebagai mana polder tersebut berguna untuk mengurangi titik rawan banjir dan ini salah satu solusi sebagai

resapan air yang akan kami benahi dengan melakukan pendalaman lagi agar air yang terserap dalam polder dapat menampung lebih banyak lagi. Solusi jangka panjang yang akan dilakukan untuk meminimalisir banjir di Samarinda dilaksanakan sesuai Masterplan Pengendalian Banjir Kota Samarinda. Program ini akan dibagi ke beberapa segmen yang disesuaikan dengan kondisi wilayahnya, misalnya pada bagian hulu akan diperbanyak kolam retensi yang berguna untuk menampung air hujan sebelum dialirkan ke Sungai Karangmumus yang akan berakhir ke Sungai Mahakam, melakukan revitalisasi terhadap Bendungan Lempake, juga menaturalisasi sungai di kawasan Bayur.

Aspek Managerial Komunikasi

Hasil observasi penelitian menemukan fakta bahwa komunikasi berperan penting dalam penanggulangan bencana, terutama untuk menyinergikan kebijakan pemerintah dan program lembaga non pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Sedangkan komunikasi dengan masyarakat korban bencana untuk mempercepat proses penanggulangan bencana dengan melibatkan sumber daya lokal terutama pemuka pendapat. Permasalahan banjir sangat berdampak pada masyarakat di Kota Samarinda. Terkait hal tersebut maka dalam penanganan tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dari berbagai pihak, baik pihak masyarakat ataupun pihak pemerintah. Untuk menanggulangi masalah banjir Pemerintah Kota Samarinda melakukan komunikasi dengan beberapa pihak-pihak yang terkait.

Keterlibatan banyak pihak dalam penanganan bencana menunjukkan adanya sistem komunikasi yang berjalan baik secara alamiah maupun melalui intervensikebijakan. Sistem komunikasi dalam penanganan bencana melibatkan proses komunikasi atau koordinasi antara pemerintah (BNPB, Pemerintah Daerah, dan lain-lain), organisasi non pemerintah (LSM, lembaga donor, media massa, dan lain-lain), swasta (perusahaan), dan masyarakat. Sistemkomunikasitersebut diperlukan agar kegiatan penanganan bencana lebih terkoordinasi dengan baik sehingga berjalan efektif dan efisien.

Aspek Managerial Ketersediaan Sumberdaya

Ketersediaan sumberdaya dalam variabel ini terdiri dari indikator sumber daya manusia (SDM), kewenangan, dan sarana prasarana. SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Sumber daya manusia pelaksana penanganan banjir di Kota Samarinda dengan tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 6 Sarjana Tehnik Sipil dan 1 orang Sarjana Tehnik Lingkungan, kepala seksi berpendidikan sarjana tehnik sebanyak 3 orang dan kepala bidang PJSA berpendidikan pasca sarjana sebanyak. Hal ini cukup memadai untuk melaksanakan penanganan banjir di Kota Samarinda.

Dalam penanganan korban telah diberikan bantuan yang dapat dimanfaatkan oleh pengungsi antara lain tenda hunian darurat (THD) dan WC Darurat. Penyediaan peralatan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana

berupaperahu karet. Penanganan bidang sumber daya air pasca bencana banjir dengan upaya struktural seperti menjaga daerah aliran sungai di beberapa lokasi. Dan yang non struktural dengan melakukan koordinasi antar daerah. Di bidang jalan agar diupayakan jalan fungsional yang dapat menyentuh penanganan yang lebih permanen, serta memodernisasi sistem jaringan jalan. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan keandalan jalan untuk peningkatan pelayanan distribusi barang dan jasa.

Dalam kaitannya dengan sungai, kualitas pemeliharaan sungai serta perencanaan pembangunan prasarana pengendali banjir sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pengendali banjir, sehingga mampu mengoptimalkan peran bendungan sebagai penampung air pada musim penghujan dan penyuplai air pada musim kemarau. Demikian yang dikatakan oleh Kepala Bidang PJSA Kota Samarinda.

Dinas PUPR Kota Samarinda sebagai instansi yang melaksanakan penanganan banjir di Kota Samarinda mempunyai kewenangan penuh terhadap setiap pekerjaan yang dibebankan. Kewenangan tersebut termasuk dalam mengambil suatu keputusan. Namun demikian kewenangan tersebut tidak boleh menyimpang dari kebijakan dan atau ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Pada pelaksanaan di lapangan petugas Dinas PUPR Kota Samarinda melaksanakan tugas mengkoordinasikan para pekerja sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) serta waktu yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

Dalam strategi pengendalian banjir di Kota Samarinda, ada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi internal diantaranya adalah komitmen pimpinan, tersedianya anggaran APBD/Bantuan pemerintah pusat atau Provinsi, dan tupoksi terhadap pengendalian banjir. Untuk reduksi banjir, Dinas PUPR Kota Samarinda melaksanakan konsep pengendalian banjir daerah tengah, yaitu mereduksi banjir (mengurangi limpasan permukaan) dengan minimalisasi perubahan tata guna lahan, termasuk penertiban pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota Samarinda.

Bencana yang terjadi akan mempunyai dampak yang sangat merugikan, seperti rusaknya sarana dan prasarana fisik (perumahan penduduk, bangunan perkantoran, sekolah, tempat ibadah, sarana jalan, jembatan, dan lain-lain).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda selaku pelaksana dari program pengendalian banjir telah berupaya mengatasi banjir di Kota Samarinda yang salah satunya adalah rehabilitasi saluran drainase dan pemeliharaan saluran drainase di Kelurahan Air Putih yang sudah dilaksanakan dengan maksimal dan baik.

Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas PUPR Kota Samarinda dalam hal pengawasan program pengendalian banjir adalah peningkatan pencegahan, pengendalian dan pengawasan kerusakan

lingkungan dan pengelolaan persampahan yang sampai sekarang masih menjadi masalah utama di Kota Samarinda, hal ini diperlukan kesadaran dari masyarakat setempat, disini diperlukan kebijakan pemerintah juga dalam menanggulangi kesadaran masyarakat untuk lingkungan Kota Samarinda.

Memperbaiki kondisi DAS yang rusak, Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Samarinda melaksanakan konsep pengendalian banjir daerah hulu, yaitu dengan meningkatkan resistensi DAS untuk reduksi potensi banjir di daerah hulu. Konsep ini dapat dilakukan dengan adanya konservasi DAS, pengembangan/revitalisasi tampungan alam (saat ini berupa rawa dan cekungan alam lainnya) dan tampungan buatan (waduk/lembung). Konsep ini diterapkan dalam Masterplan Pengendalian Banjir Kota Samarinda dengan pengembangan beberapa bendungan di DAS Karangmumus seperti Bendungan Karangmumus Atas, Pampang Kanan, Pampang Kiri, Lubang Patung, Bendali Muang, Bendali Sempaja. Untuk Sub DAS karang Asam Kecil dengan terbangunnya Bendali HM. Ardans. Sub DAS Loa Janan dengan Bendungan Tani Aman.

Aspek Managerial Sikap dan Komitmen Pelaksana (Disposisi)

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dimana pada bulan Juni Tahun 2019, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR mengunjungi Kota Samarinda untuk memantau dan meninjau lokasi banjir di Samarinda, dimana dalam kunjungan Dirjen SDA di lokasi banjir dan Bendungan Benanga, beliau berjanji akan memperjuangkan maksimal upaya penanganan banjir di kota Samarinda. Dimana menurut Dirjen SDA Kementerian PUPR, penanganan banjir di Samarinda harus ada kolaborasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kota, masyarakat dan swasta. Sinkronisasi itu meliputi pemaparan masterplan pengendalian banjir yang sempat dibuat Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim 2013 lalu. Sekitar 20an program pengendalian banjir dan sungai yang diusulkan BWS III Kalimantan. Kebijakan Pemprov dengan daerah lain berdekatan dengan Samarinda, misalnya Kukar.

Tak ketinggalan persoalan sosial, misalnya relokasi warga bantara Sungai Karang Mumus. Hal tersebut memberikan komitmen Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk meningkatkan program tersebut lebih lanjut mengenai masterplan pengendalian banjir Samarinda dan prioritas penanganan banjir. Menyikapi hal tersebut, artinya sudah ada komitmen pendanaan revitalisasi Bendungan Benanga dan sinkronisasi peran dengan pemda. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dimana sikap dan komitmen dari Pelaksana Program Dinas PUPR Kota Samarinda dilatarbelakangi dengan sikap dan komitmen yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Samarinda, yang artinya Pelaksana Program Dinas PUPR hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Kota Samarinda.

Aspek Managerial Struktur Birokrasi

Dilihat dari aspek struktur birokrasi implementasi kebijakan penanganan banjir di Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sudah tepat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum yaitu melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan Walikota.

Dalam hal pengelolaan sistem pemantauan kota, Pemerintahan Kota Samarinda memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelolanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah yang memindahkan tanggung jawab lebih besar pada Pemerintahan kabupaten/Kota dengan tujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih otonomi. Sedangkan dalam PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai juga dijelaskan mengenai kewenangan dari pemerintah daerah maupun provinsi untuk mengatur bangunan-bangunan pengendali banjir.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Program pengendalian banjir di Kota Samarinda sejauh ini secara managerial sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas PUPR Kota Samarinda. Temuan pada empat variabel yang mempengaruhi pelaksanaan program menunjukkan bahwa implementasi sudah berjalan sebagaimana mestinya meskipun di beberapa variabel masih terdapat hambatan.

Adapun rekomendasi yang peneliti berikan terkait dengan temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

Diperlukan dana yang lebih besar dari Pemerintah untuk mengusahakan agar air banjir yang masih selalu terjadi bisa diatasi dengan menggunakan teknologi yang mencukupi seperti penggantian pompa-pompa air yang ada dengan pompa baru yang kapasitas dan tenaganya lebih besar sehingga kemampuannya meredakan banjir semakin kompeten.

Pemerintah hendaknya menyiapkan peraturan dan hukuman kepada pihak-pihak yang diduga melanggar kepentingan umum yang menyebabkan banjir. Adanya hukuman diharapkan agar para pelaku tersebut jera dan berhati-hati dalam bertindak agar tidak merugikan kepentingan umum.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2014) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2017) *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Keti. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2018) *30 Keterampilan Esensial Untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedu. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980) *Implementing Public Policy*. Washington DC:

Congressional Quarterly Press.

- Islamy, M. irfan (2014) *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M. B., Huberman, M. A. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2017) *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 7. Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks.
- Nugroho, R. (2014) *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rafiq (2014) *Studi Tentang Kebencanaan Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman.
- Sodiq, F. (2015) 'Upaya Pemerintah Kota Dalam Pengendalian Banjir Di Kota Samarinda', *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2). Available at: <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1302>.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Susanti, N. E. (2018) 'Program Pengendalian Banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya di Kelurahan Air Putih', *eJournal Administrasi Publik*. Available at: <https://www.portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=7677>.
- Winarno, B. (2012) *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT. Buku Seru.